



TAMAS SULYOK SEBAGAI PRESIDEN BARU HONGARIA

Presiden baru Hongaria Tamas Sulyok menyampaikan pidato saat upacara pelantikannya di Istana Sandor, kediaman Presiden Hongaria di Budapest, Hongaria, Minggu (10/3).

Gangster Kuasai Haiti, Mayat-mayat Bergelimpangan dan Warga Negara Barat Ramai-ramai Kabur

Kerusuhan melanda Haiti setelah para gangster menguasai negara. Warga negara-negara Barat ramai-ramai pergi.

PORT-AU-PRINCE (IM)- Kerusuhan melanda Haiti setelah para gangster menguasai negara tersebut. Banyak mayat bergelimpangan di jalan-jalan ibu kota, dan warga negara-negara Barat ramai-ramai menghindar.

Militer AS mengatakan pada Minggu (10/3), bahwa pihaknya telah melakukan operasi di Haiti untuk mengangkut personel kedutaan yang tidak penting dari negara tersebut dan menambahkan pasukan AS untuk meningkatkan keamanan kedutaan.

Seperti AS, para diplomat Jerman juga ramai-ramai mulai meninggalkan Ibu Kota Haiti, Port-au-Prince, sejak hari Minggu.

Penduduk yang terkepuang berusaha menyelamatkan diri setelah terjadinya kerusuhan baru-baru ini, dan sebuah kelompok PBB memperingatkan ibu kotamenjadi "kota yang dikelung" setelah gangster bersenjata menargetkan istana presiden dan markas polisi.

Kelompok geng kriminal, yang sudah menguasai sebagian besar Port-au-Prince serta jalan-jalan menuju seluruh negara tersebut, telah melancarkan kekacauan dalam beberapa hari terakhir ketika mer-

eka mencoba menggulingkan Perdana Menteri Ariel Henry sebagai pemimpin negara termiskin di Western Hemisphere tersebut.

"Militer AS telah melakukan operasi untuk meningkatkan keamanan Kedutaan Besar AS di Port-au-Prince, memungkinkan operasi misi kedutaan kami berlanjut, dan memungkinkan personel yang tidak penting untuk menghindar," bunyi pengumuman Komando Selatan Militer AS.

"Pengangkutan personel masuk dan keluar dari kedutaan juga dilakukan, konsisten dengan praktik standar kami untuk meningkatkan keamanan Kedutaan Besar," lanjut pengumuman tersebut, seperti dikutip AFP, Senin (11/3).

Operasi menjelang subuh itu rupanya dilakukan dengan penerbangan helikopter dari dan ke bandara. Seorang koresponden AFP dan warga sekitar mendengar suara baling-baling helikopter di atas.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kedutaan tetap buka, dengan operasi terbatas, dan dengan pengurangan personel.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan duta besarnya

bergabung dengan perwakilan Uni Eropa lainnya untuk pergi ke Republik Dominika pada hari Minggu.

"Karena situasi keamanan yang sangat tegang di Haiti, duta besar Jerman dan perwakilan tetap di Port-au-Prince berangkat ke Republik Dominika hari ini bersama dengan perwakilan delegasi Uni Eropa," kata juru bicara Kementerian tersebut kepada AFP, seraya menambahkan bahwa mereka akan bekerja dari sana "sampai pemberitahuan lebih lanjut".

CARICOM, sebuah aliansi negara-negara Karibia, telah memanggil utusan dari Amerika Serikat, Perancis, Kanada dan PBB untuk menghadiri pertemuan hari Senin di Jamaika untuk membahas kekerasan dan cara memberikan bantuan ke Haiti.

Wakil Presiden Guyana Bharrat Jagdeo mengatakan bahwa negara-negara tersebut akan berusaha untuk menertibkan dan memulihkan kepercayaan pada masyarakat Haiti. "Penjahat kini telah mengambil alih negara. Tidak ada pemerintahan, ini menjadi masyarakat yang gagal," katanya.

Menurut laporan AFP, dengan meningkatnya disfungsi, banyak mayat terlihat tergeletak di jalan-jalan Port-au-Prince. Kerusuhan tersebut telah menyebabkan 362.000 warga Haiti mengungsi, kata Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

"Warga Haiti tidak bisa

menjalani kehidupan yang layak. Mereka hidup dalam ketakutan, dan setiap hari, setiap jam situasi ini terus berlanjut, traumanya semakin parah," kata Philippe Branchat, ketua IOM di Haiti, dalam sebuah pernyataan.

Pada hari Sabtu (9/3) puluhan warga mencari perlindungan di gedung-gedung publik, dan beberapa berhasil membobol salah satu fasilitas, menurut koresponden AFP.

Sementara Polisi pada Jumat (8/3) malam, berhasil menghalau serangan geng, termasuk di istana presiden, dan beberapa bandit terbunuh, kata Lionel Lazare dari serikat polisi Haiti.

Geng-geng bersenjata baru-baru ini menyerang infrastruktur penting, termasuk dua penjara, sehingga sebagian besar dari 3.800 narapidana melarikan diri.

Bersama dengan sejumlah warga sipil Haiti, geng-geng tersebut menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Henry, yang sedianya akan meninggalkan jabatannya pada bulan Februari namun malah menyetujui kesepakatan pembagian kekuasaan dengan oposisi sampai pemilu baru diadakan.

Washington telah meminta Henry untuk segera melakukan reformasi politik. Dia berada di Kenya ketika kekerasan pecah dan kini dilaporkan terdampar di wilayah Puerto Riko.

Dewan Keamanan PBB memberikan lampu hijau

pada bulan Oktober untuk misi kepolisian multinasional yang dipimpin oleh Kenya, namun pengurangan tersebut terhenti oleh pengadilan Kenya. Port-au-Prince dan Haiti bagian barat berada dalam keadaan darurat selama sebulan, dan jam malam berlaku hingga Senin, meskipun polisi yang kewalahan tidak mungkin bisa menegakkannya.

Di Port-au-Prince, Filienne Setoute menceritakan kepada AFP bagaimana dia telah bekerja di Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja selama lebih dari 20 tahun.

Pekerjaan itu berarti dia bisa membangun rumah sendiri. "Tetapi sekarang saya di sini, seorang tunawisma. Saya melarikan diri tanpa mengetahui ke mana harus pergi, itu adalah sebuah pecehan," katanya.

Bandara Haiti tetap ditutup sementara pelabuhan utama—titik utama impor makanan—melaporkan penjarahan sejak penghentian layanan pada hari Kamis (7/3). "Jika kita tidak dapat mengakses kontainer-kontainer tersebut, Haiti akan segera mengalami kelaparan," kata organisasi non-pemerintah Mercy Corps.

Salah satu tanda harapannya, sebuah paroki Katolik mengatakan pada hari Minggu bahwa empat misionaris dan seorang rekannya telah dibebaskan setelah diculik bulan lalu di Port-au-Prince, di mana penculikan sudah menjadi hal biasa. ● tom

Jerman Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza Selama Ramadhan

BERLIN (IM) - Kanselir Jerman Olaf Scholz menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza selama bulan Ramadhan. Hal itu bertujuan agar bantuan kemanusiaan yang penting dapat diberikan kepada rakyat Palestina yang membutuhkan.

"Saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Israel dan Palestina menginginkan satu hal yang sama: Perdamaian. Satu langkah yang dapat dilakukan untuk itu adalah gencatan senjata yang lebih lama, dan idealnya dilakukan selama Ramadhan," ucap Scholz, Senin (11/3).

Selain menjamin semakin banyak bantuan kemanusiaan dapat tiba di Gaza, gencatan senjata juga akan memastikan warga Israel yang disandera dibebaskan, kata Scholz. "Presiden Amerika Serikat (Joe Biden) dan Saya serta banyak orang lainnya berkomitmen mewujudkan hal ini dengan seluruh usaha kami," ujar dia.

Dalam pernyataan yang ia sampaikan untuk menyambut Ramadhan, Scholz menyebut dirinya memahami perasaan umat Muslim yang amat kha-

watir terhadap kondisi saudaranya di Jalur Gaza.

"Pikiran dan perasaan umat Muslim saat ini tentunya terpaku kepada para wanita, pria, dan anak-anak di Timur Tengah. Banyak dari mereka punya teman maupun anggota keluarga yang mereka khawatirkan. Saya ingin memastikan bahwa mereka tidak sendiri," ucap Scholz.

Walaupun demikian, Kanselir Jerman itu menyebut bahwa Israel juga memiliki hak membela diri untuk melawan Hamas. "Namun, Israel harus tetap mematuhi hukum-hukum internasional dan melindungi rakyat sipil," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Jerman berkomitmen mengirimkan makanan, obat-obatan, serta bentuk bantuan lainnya kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza. Meski tekanan komunitas internasional supaya gencatan senjata terwujud semakin besar, upaya diplomasi untuk mencapai hal tersebut belum mencapai titik terang. Namun, Presiden Biden tetap meyakini bahwa gencatan senjata pasti akan terjadi. ● tom

Sambut Awal Ramadhan, Inggris Umumkan Dana Rp2,3 Triliun untuk Keamanan Muslim

LONDON (IM)-Memasuki bulan suci Ramadhan, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana sebesar 117 juta poundsterling atau Rp2,3 triliun untuk meningkatkan keamanan di situs-situs ibadah Muslim. Menteri Dalam Negeri James Cleverly pada Minggu (10/3) mengatakan, langkah itu diambil untuk menurunkan insiden serangan terhadap Mus-

lim yang belakangan meningkat di Inggris sejak perang Israel Hamas meletus di Jalur Gaza.

"Kami tidak akan membiarkan kejadian di Timur Tengah digunakan sebagai alasan untuk membenarkan pelecehan terhadap Muslim Inggris," ujarnya, seperti dimuat harian Le Monde.

Sebuah kelompok yang memantau kejahatan rasial terhadap komunitas Muslim bernama Tell MAMA,

mencatat ada 2.010 insiden Islamophobia dalam empat bulan perang Gaza. Jumlah itu yang terbesar dan meningkat sebesar 335 persen dari 600 insiden pada periode yang sama pada tahun 2022-2023.

Tindakan Islamophobia yang dimaksud mencakup perilaku kasar, ancaman, penyerangan, vandalisme, diskriminasi, ujaran kebencian, dan literatur anti-Muslim. ● ans



KAPAL PESIAR ZUIDERDAM BERLABUH DI DALIAN, TIONGGOK

Kapal pesiar Zuiderdam yang dioperasikan oleh Holland America Line pada Minggu (10/3) berlabuh di kota pelabuhan Dalian, di timur laut Tiongkok, menandai dimulainya kembali aktivitas pelayaran internasional di terminal Dalian. Ini adalah kapal pesiar internasional pertama yang mengunjungi Tiongkok timur laut sejak September 2023.

Mahasiswa di Moskow Dipenjarakan Gara-gara Nama Jaringan Wi-Fi Pro Ukraina

MOSKOW (IM)- Seorang pelajar dijatuhi hukuman 10 hari penjara di Moskow, Rusia setelah mengganti nama jaringan wi-finya dengan slogan pro-Kyiv.

Mahasiswa Universitas Negeri Moskow itu memberi judul jaringan tersebut "Slava Ukraini!" yang berarti "Kemuliaan bagi Ukraina!". Pengadilan Moskow memutuskan dia bersalah karena menampilkan "simbol organisasi ekstremis" pada Jumat (8/3) lalu.

Sejak dimulainya perang Rusia di Ukraina, ribuan orang telah dijatuhi hukuman penjara atau denda karena mengkritik invasi atau mendukung Ukraina.

Mahasiswa tersebut ditangkap pada Rabu, (6/3) pagi di Moskow, setelah seorang petugas polisi melaporkan nama jaringan tersebut kepada pihak berwenang.

Menurut dokumen pengadilan, petugas memeriksa kamarnya di dalam akomodasi mahasiswa universitas, dan menemukan komputer pribadi dan router wi-fi.

Pengadilan mengatakan dia menggunakan jaringan tersebut untuk "mempromosikan slogan 'Slava Ukraini!' ke jumlah pengguna yang tidak terbatas dalam jangkauan wi-fi." Router tersebut kini telah disita.

"Slava Ukraini" telah menjadi seruan para pendukung Ukraina, dan sering terdengar diteriakan selama protes terhadap invasi besar-besaran Rusia, yang diluncurkan

pada 24 Februari 2022.

Mahasiswa tersebut dinyatakan bersalah atas "demonstrasi publik atas simbolisme Nazi atau simbol organisasi ekstremis".

Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali membuat klaim tak berdasar tentang "rezim neo-Nazi" di Ukraina, dan menggunakannya untuk membenarkan invasinya.

Pelajar tersebut merupakan orang terahir dalam daftar panjang orang-orang biasa Rusia yang dihukum karena komentar atau tindakan mereka mengenai perang. Bulan lalu, ratusan orang ditahan karena sekadar meletakkan bunga untuk mengenang pemimpin oposisi Alexei Navalny, yang meninggal secara mencurigakan di penjara Lingkaran Arktik.

Konflik tersebut bahkan tidak boleh disebut sebagai "perang" di Rusia - konflik tersebut harus disebut sebagai "operasi militer khusus".

Menurut Amnesty International, tahun lalu lebih dari 21.000 orang menjadi sasaran "undang-undang represif" Rusia yang digunakan untuk "menindas aktivis anti-perang".

Kelompok hak asasi manusia mengatakan "pengadilan yang sangat tidak adil" digunakan untuk "menjatuhkan hukuman penjara dan denda yang besar untuk membungkam kritik dalam menanggapi perbedaan pendapat sekecil apa pun." ● tom

Mantan Presiden Honduras Divonis Bersalah Atas Kasus Penyelundupan 500 Ton Kokain



HONDURAS (IM)- Mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, divonis bersalah oleh pengadilan New York pada Jumat (8/3), setelah dituntut terlibat dalam konspirasi dengan penyelundup 500 ton Kokain.

Ia diduga melibatkan pasukan militer dan polisi nasional untuk memuluskan penyelundupan besar-besaran kokain ke Amerika Serikat.

Keputusan tersebut diambil setelah dua minggu persidangan intens yang diikuti dengan ketat oleh publik di Honduras.

Mengutip Euro News, Sabtu (9/3) Hernandez, yang menjabat sebagai pemimpin Honduras selama dua periode, dihadapkan pada ancaman hukuman minimal 40 tahun penjara dengan potensi hukuman seumur hidup.

Hukuman resmi nantinya akan dijatuhkan pada 26 Juni mendatang.

Pengacara pembela, Sabrina Shroff, menyatakan bahwa kliennya berencana mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Sementara itu, Jaksa AS Damian Williams menyatakan harapannya bahwa hukuman ini akan menjadi pesan bagi politisi korup di seluruh dunia.

Dia menekankan bahwa Hernandez memiliki peluang untuk menjadi pemimpin yang

berdedikasi untuk kebaikan negaranya, tetapi ia malah memilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

"Hernandez memilih untuk menyalahgunakan kantor dan negaranya demi keuntungan pribadinya dan bermitra dengan beberapa organisasi penyelundup narkoba terbesar dan paling kejam di dunia untuk mengangkut berton-ton kokain ke Amerika Serikat," kata Williams.

Hernandez ditangkap di rumahnya di Tegucigalpa pada tahun 2022, tiga bulan setelah ia meninggalkan jabatannya.

Proses ekstradisi ke Amerika Serikat kemudian dilakukan pada April di tahun yang sama. Jaksa AS menuduh Hernandez terlibat dengan penyelundup narkoba sejak 2004, dengan menerima suap signifikan selama kariernya di tingkat politik Honduras.

Meskipun Hernandez mengakui adanya pembayaran uang narkoba kepada beberapa partai politik di negaranya, ia tetap membantah menerima suap secara pribadi.

Persidangan juga menyajikan saksi-saksi, termasuk para penyelundup narkoba, yang memberikan kesaksian mendalam mengenai keterlibatan mantan presiden dalam jaringan perdagangan narkoba internasional. ● tom